

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, E. E., A Septarani, W. I. (2019). “Studi tentang Ketersediaan Obat di Puskesmas Meo-Meo Kota Baubau”. Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan. Volume 1 no 2*
- Asnawi, R., Kolibu, F. K., Meramis, F. R. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wolaang. *Jurnal Kesmas. Volume 8 No 6 : 309*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Surat Keputusan Menteri RI Nomor HK.02.02/Menkes/068/2010 tentang Kewajiban Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*”. Jakarta.
- Dapertemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). “*Surat Keputusan Menteri RI Nomor HK.03.01/Menkes/146/2010 tentang Harga Obat Generik*”. Jakarta.
- Faisal Yusuf. (2016). “Studi Perbandingan Obat Generik dan Obat Dengan Nama Dagang”. *Jurnal Farmanesia. Volume 1.5-10.*
- Hari Sulistiyono, dkk. (2020). “Dampak Kebijakan Pengadaan Obat Pada Puskesmas di Jakarta Era Jaminan Kesehatan Nasional”. *Jurnal Kesehatan. Volume 3 No.4.*
- Kemenkes RI. (2013). “*Peraturan Mentreri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan pada Jaminan Kesehatan Nasional*”. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). “*Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 791/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Esensial Nasional*”. Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan RI. (1983). Nomor: 2380/A/SK/1983 “*Tanda Khusus Untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*”. Jakarta

Keputusan Menteri Kesehatan RI. (1986). Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 "*Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Menteri Kesehatan Republik Indonesia*". Jakarta.

Kobandaha, (2016). "*Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wenang Kota Manado*". (Online) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas>, Diakses 12 juli 2021.

Menkes RI. (2019). "*Peraturan Mentreri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019*". Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2018). Nomor 4 Tahun 2018 tentang "*Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Psekotropika Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*". Jakarta

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2013). Nomor 40 Tahun 2013 tentang "*Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*". Jakarta.

Permenkes RI, (2016). "*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*". Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2010). Nomor: HK. 02.02/Menkes/068/I/2010. "*Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*". Jakarta: 14 Januari 2010.

Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2014). Nomor: 63 Tahun 2014. "*Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalogue*". Jakarta: 5 September 2014.

Rawia A, dkk. (2019). "*Analisis Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Wolaang*". Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Kesmas, Vol.8 No.6.

Undang – Undang Republik Indonesia. (1997). Nomor 5 Tahun 1997 tentang "*Psikotropika*". Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 35 Tahun 2009 tentang “*Narkotika*”. Jakarta.

Syair, (2008). “*Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008*” [http: scribd.com](http://scribd.com). diakses pada tanggal 02 juni 2021.

Seto, S., dkk. (2004). “*Manajemen Farmasi*”. Airlangga University Press:Surabaya.